



PERAN ASOSIASI PETANI TEMBAKAU INDONESIA (APTI) DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN PETANI TEMBAKAU DI KABUPATEN TEMANGGUNG

Riris Tri Nurwiyati¹, Drs. Yuwanto, M.Si. PH. D ²,
Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Abstract

Association of Indonesian Tobacco Farmers (APTI) Temanggung as a container group of farmers in Temanggung Regency is expected to play an active role on what happens among tobacco farmers. Through the implementation of targeted programs, improving the welfare of tobacco farmers in Temanggung Regency and their efforts in fighting for the interests of tobacco farmers in Temanggung Regency can be realized. Targeted programs will also benefit the empowerment of the Indonesian Tobacco Farmers Association (APTI) Temanggung itself ..

The purpose of this research is to know how APTI form and how to respond to Tobacco Bill in Temanggung Regency. Know how the effectiveness of APTI's struggle in Temanggung Regency to protect their interests

To answer the problem and purpose of this research, writer use qualitative descriptive approach. The results show the form and way of APTI struggle in responding to the draft law can be seen from their action down the road peridoik and try to meet the members of the board and officials who influence a policy.

Over time APTI is expected to establish cooperation with more parties or tobacco industry companies and improve the ability of APTI Temanggung in order to maintain the existence of APTI Temanggung and can be useful for farmers in Temanggung.

Keywords: APTI, Role, Tobacco Farmer

¹ Riris Tri Nurwiyati adalah mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang alamat email : riristri@gmail.com

² Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip

Abstraksi

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Temanggung sebagai wadah kelompok petani di Kabupaten Temanggung diharapkan dapat berperan aktif terhadap apa yang terjadi di kalangan petani tembakau. Melalui pelaksanaan program-program tepat sasaran maka peningkatan kesejahteraan petani tembakau di Kabupaten Temanggung dan upaya mereka dalam memperjuangkan kepentingan para petani tembakau di Kabupaten Temanggung dapat diwujudkan. Program-program tepat sasaran juga akan bermanfaat bagi pemberdayaan dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Temanggung sendiri..

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk dan cara yang dilakukan APTI dalam merespon RUU Tembakau di Kabupaten Temanggung. Mengetahui bagaimana *efektivitas* perjuangan APTI di Kabupaten Temanggung untuk melindungi kepentingan mereka

Untuk menjawab permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya bentuk dan cara perjuangan APTI dalam merespon RUU pertembakauan dapat dilihat dari aksi mereka turun ke jalan secara periodik dan mencoba menemui anggota dewan dan pejabat yang berpengaruh terhadap suatu kebijakan.

Seiring berjalannya waktu APTI diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan lebih banyak pihak atau perusahaan industri tembakau dan meningkatkan kemampuan APTI Temanggung supaya dapat menjaga eksistensi keberadaan APTI Temanggung dan dapat bermanfaat bagi para petani di Temanggung.

Kata kunci: APTI, Peran , Petani Tembakau

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia terkenal dengan sebutan Negeri Tembakau, karena merupakan salah satu negara dengan penghasil tembakau terbaik di dunia. Dengan tersebarnya lahan persawahan dan perkebunan, bangsa Indonesia dapat menghasilkan tanaman yang beraneka ragam, seharusnya dengan keanekaragaman hasil pertanian yang ada di Indonesia dapat mendorong pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan pertanian, pembangunan pertanian yang tepat dan dikelola dinas terkait dengan baik akan membawa dampak positif bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penanganan yang tepat terhadap sektor pertanian dapat menyerap tenaga kerja di daerah tersebut. Hal itu dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, karena di negara Indonesia angka kemiskinan dan pengangguran masih sangat tinggi dibandingkan dengan negara maju. Sektor pertanian, misalnya tanaman tembakau, karena tanaman tembakau bisa tumbuh di semua dataran ketinggian, mulai dari dataran rendah sampai daerah pegunungan. Tanaman tembakau memang sangat cocok bila dikembangkan di negara Indonesia, karena diketahui bahwa Indonesia mempunyai suhu dan alam yang cocok untuk tanaman tembakau.

Indonesia menjadi negara keenam penghasil tembakau terbesar dunia dengan jumlah rata-rata produksi tembakau sebesar 164.851 ton/tahun. Hasil panen tembakau di Indonesia

mampu menyumbang 2,67% daun tembakau dari pasokan global. Alasan utama menempatkan tembakau sebagai komoditi strategis adalah fakta bahwa komoditi ini masih menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi keuangan negara. Tembakau masih sangat menjanjikan keuntungan yang besar dari sektor pertanian, industri, perdagangan, serta keuangan.

Pentingnya peranan pemerintah dan negara dalam melindungi industri nasional bukan hanya dikarenakan ekonomi tembakau memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan negara, melainkan juga dikarenakan industri ini juga memberikan sumbangan langsung terhadap pendapatan nasional, peyerapan tenaga kerja, dan *multiplier effect* yang luas terhadap perekonomian di Indonesia, terutama untuk kepentingan petani tembakau itu sendiri. Pertanian di Indonesia di era globalisasi harus dipandang sebagai sektor ekonomi yang simetris dengan sektor yang lainnya. Sektor ini tidak boleh lagi hanya berperan sebagai aktor pendukung bagi pembangunan nasional seperti selama ini diberlakukan, tetapi harus menjadi pemeran utama yang sejajar dengan sektor industri. Sektor pertanian harus menjadi sektor yang modern, efisien, dan berdaya saing, dan tidak boleh hanya dipandang sebagai pengaman untuk menampung tenaga kerja tidak terdidik yang melimpah ataupun penyedia pangan yang murah agar sektor industri mampu bersaing dengan hanya mengandalkan upah yang cenderung rendah.

Sementara itu Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Temanggung sebagai wadah kelompok petani di Kabupaten Temanggung diharapkan dapat berperan aktif terhadap apa yang terjadi di kalangan petani tembakau. Melalui pelaksanaan program-program tepat sasaran maka peningkatan kesejahteraan petani tembakau di Kabupaten Temanggung dan upaya mereka dalam memperjuangkan kepentingan para petani tembakau di Kabupaten Temanggung dapat diwujudkan. Program-program tepat sasaran juga akan bermanfaat bagi pemberdayaan dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Temanggung sendiri.

Pemberdayaan ini akan bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dan kepekaan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Temanggung dalam menghadapi masalah-masalah yang menimpa petani tembakau di Kabupaten Temanggung. Pada lingkup nasional dapat dilihat dari peran Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Temanggung untuk melakukan kerjasama dan negosiasi dengan pihak-pihak nasional, agar dalam menentukan suatu kebijakan atau RUU pertembakauan harus melihat dinamika kepentingan semua pihak. Pihak-pihak ini dapat berupa Pemerintah Pusat dalam hal regulasi nasional, pabrik industri rokok dalam hal pemasaran tembakau, dan pihak-pihak lain yang berkaitan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani tembakau.

Berdasar uraian diatas, maka identifikasi permasalahan atau focus masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perjuangan APTI Kabupaten Temanggung dalam merespon RUU pertembakauan ?
2. Bagaimana cara perjuangan APTI Kabupaten Temanggung dalam merespon RUU pertembakauan ?
3. Bagaimana *efektivitas* perjuangan APTI Kabupaten Temanggung untuk melindungi kepentingan mereka terkait RUU Pertembakauan?
4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat perjuangan APTI Kabupaten Temanggung dalam memperjuangkan kepentingan mereka tersebut ?

B. Kajian Teori

1. Kelompok Kepentingan (*interest group*)

Menurut Ramlan Surbakti (1999), kelompok kepentingan (*interest group*) ialah sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dan/atau tujuan, yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan. Sebagai kelompok yang terorganisasi, selain keanggotaannya jelas, kelompok ini juga memiliki pola kepemimpinan, sumber keuangan untuk membiayai kegiatan, dan pola komunikasi baik ke dalam maupun keluar organisasi.³

Setiap individu atau kelompok memiliki kepentingan yang harus diraih dan dipertahankan bagi kelangsungan hidupnya. Upaya memperjuangkan kepentingan tersebut membutuhkan dukungan dari banyak pihak untuk memperjelas tujuan dari adanya upaya tersebut. Bentuk kekuatan yang mempunyai daya dukung adalah kekuatan yang di dalamnya terdapat dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk inilah yang disebut dengan kelompok kepentingan (*interest group*).

Kelompok kepentingan juga dapat diartikan sebagai sarana untuk menyampaikan atau memperkuat penyampaian tuntutan kepentingan anggota masyarakat terhadap sistem politik.⁴ Selain itu kelompok kepentingan juga dapat didefinisikan sebagai setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa, pada waktu yang sama, bekehendak memperoleh jabatan publik.⁵

Dari definisi-definisi di atas, ada enam substansi pemahaman konsep kelompok kepentingan yang dapat diambil: (Fathurahman dan Sobri, 2002)⁶

1. Setiap kelompok kepentingan merupakan sekumpulan orang yang mengorganisasikan dirinya atas nama satu orang atau lebih kepentingan tertentu yang diperjuangkan.
2. Adanya kepentingan yang sama, menyatukan sekelompok orang untuk bergabung membentuk satu organisasi dengan nama tertentu.
3. Setiap aktivitas kelompok kepentingan selalu bergandengan dengan isu publik yang ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.
4. Setiap aktivitas yang dilakukan kelompok kepentingan, akan mengatasmakan masyarakat, mengingat fungsinya sebagai artikulator (mengartikulasi) atau pemilah-pemilah kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, dan mengubahnya menjadi tuntutan yang akan ditujukan kepada pemerintah.
5. Aktivitas kelompok kepentingan tidak ditujukan untuk memperoleh jabatan publik, tetapi lebih pada upaya partisipasi politik atau berusaha mempengaruhi kebijakan yang diambil pemerintah.
6. Adanya berbagai variasi atau tipe kelompok kepentingan artinya tidak memiliki bentuk tunggal, tergantung dari perbedaan karakteristik keorganisasian dari kelompok kepentingan.

³Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, hlm. 109

⁴Mohtar Mas'oe'd dan Colin MacAndrews, 2001, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 52

⁵*Ibid.*, hlm. 53

⁶Budi Suryadi, 2006, *Kerangka Analisis Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: IRCiSoD, hlm. 47-48

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu multidisipliner karena melibatkan banyak disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosial, ekonomi, dan psikologi. Studi kebijakan berkembang pada awal 1970-an terutama melalui tulisan Harold D. Laswell. Definisi dari kebijakan publik yang paling awal dikemukakan oleh Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Howlett dan Ramesh (1995:2) yang mendefinisikan kebijakan publik/*public policy* sebagai “suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu (a projected of goals, values, and practices)”.

Kebijakan publik adalah keputusan atau peraturan yang dibuat oleh yang berwenang untuk mengatasi masalah publik, sehingga diharapkan tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Ciri-ciri utama kebijakan publik adalah suatu peraturan atau ketentuan yang diharapkan dapat mengatasi masalah publik. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa yang dilakukan pemerintah, bagaimana mengerjakannya, mengapa perlu dikerjakan dan perbedaan apa yang dibuat. Dye seperti yang dikutip Winarno berpandangan lebih luas dalam merumuskan pengertian kebijakan, yaitu sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever governments choose to do or not to do*).⁷

Menurut Dye (1978) ada beberapa aspek yang perlu dilakukan untuk menganalisis suatu kebijakan, yaitu:

- Mendiskripsikan kebijakan publik, dengan demikian dapat diketahui apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah dalam aspek kesejahteraan masyarakat, pertahanan negara, pendidikan, hak-hak sipil, dan perpajakan.
- Mengkaji alasan-alasan yang mendorong pemerintah melancarkan kebijakan tertentu.
- Meneliti akibat kebijakan terhadap masyarakat.⁸

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif-deskriptif karena penelitian ini diarahkan untuk melukiskan dan menjelaskan gejala, fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat suatu situasi, masalah, fenomena, pelayanan atau program, penyediaan informasi mengenai suatu situasi, kehidupan masyarakat atau menggambarkan sikap masyarakat menanggapi suatu isu tertentu.⁹ Tujuan penelitian dengan metode kualitatif adalah untuk mengeksplor fenomena-fenomena di masyarakat yang tidak dapat dikuantifikasikan. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasar teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan dan diperoleh dari situasi alamiah, Penelitian kualitatif memfokuskan pada analisis dan pemahaman data sehingga mengutamakan kualitas analisis daripada data yang bersifat statistik.

⁷Budi Winarno. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo

⁸Dye, 1978, Ripley, 1985, Winarno, 2002, Lester dan Stewart, 2002.

⁹Ahmad Taufiq. 2006 Modul *Dasar-Dasar Penelitian*. Semarang : FISIP UNDIP. Halaman 1-11

D. Hasil Penelitian

Tujuan awal bahwa didirikannya APTI Temanggung adalah sebagai reaksi adanya peraturan pemerintah yang dirasa memberatkan petani tembakau di Temanggung. Peraturan yang membatasi kadar TAR dan nikotin dalam rokok ini dianggap tidak relevan jika diterapkan di Temanggung mengingat kadar TAR dan nikotin tembakau Temanggung yang sangat tinggi. Munculnya APTI Temanggung sebagai salah satu kelompok masyarakat yang peduli dengan petani tembakau menjadikan petani merasa mempunyai “rumah perlindungan” ketika petani tembakau dihadapkan pada peraturan atau kendala yang memberatkan dan mengganggu eksistensi mereka.

Dalam sebuah kelompok yang mengutamakan kepentingan anggota (*interest group*) seperti APTI Temanggung, akan terdapat suatu bentuk kekuatan yang mempunyai daya dukung dari orang-orang yang ada di dalamnya yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan APTI Temanggung di sini adalah mencapai dan meningkatkan kesejahteraan petani tembakau yang ada di Kabupaten Temanggung dan melindungi dari serangan-serangan –dalam bentuk apapun- yang menyerang petani tembakau.

Kelompok kepentingan (*interest group*) ialah sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dan/atau tujuan, yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan.¹⁰

Berdasarkan substansi di atas, pada tiap poinnya keberadaan APTI Temanggung dapat diuraikan sebagai berikut:

1. APTI Temanggung didirikan untuk melindungi dan mengakomodir kepentingan dan kebutuhan petani tembakau sehingga dapat mempertahankan eksistensinya dalam pemenuhan kebutuhan pertembakauan.
2. Orang-orang yang berada di dalam APTI Temanggung adalah orang-orang yang berusaha untuk selalu peduli dengan apa yang sedang dialami oleh petani tembakau supaya para petani perlindungan.
3. Program-program APTI Temanggung dilakukan untuk mengembangkan petani tembakau dan untuk menunjukkan kepada pihak-pihak lain termasuk pemerintah mengenai keberadaan mereka dan menuntut perlakuan perlindungan yang sama sebagai warga negara.
4. Salah satu cara APTI Temanggung untuk mengemukakan suaranya adalah dengan melakukan demonstrasi. Demonstrasi ini dilakukan sebagai bentuk reaksi petani tembakau untuk menolak suatu bentuk rancangan atau undang-undang peraturan pemerintah yang tidak mengakomodir kepentingan petani dan akan “membunuh” petani tembakau. Untuk saat ini APTI Temanggung fokus untuk mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Pertembakauan
5. Aktivitas yang dilakukan APTI Temanggung semata-mata dilakukan untuk perlindungan dan penguatan petani tembakau, bukan untuk tujuan-tujuan politis ataupun tujuan lain. APTI Temanggung berupaya untuk selalu memberikan informasi bagi petani tembakau mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan oleh petani tembakau.
6. APTI Temanggung mempunyai fokus khusus kepada petani tembakau sehingga semua program dilakukan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan petani tembakau.

¹⁰ Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, hlm. 109

APTI Temanggung juga mengajarkan semua petani tembakau anggotanya untuk dapat mengembangkan dirinya untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pengembangan diri petani ini tidak hanya sekedar pada pengembangan pola pikir tetapi juga pada pengembangan pola budaya petani tembakau. Proses ini juga dapat dikelompokkan ke dalam suatu langkah pemberdayaan manusia dalam pembangunan. Dalam proses pembangunan petani tembakau ini memang harus disertai dengan kesadaran kritis dari petani tembakau itu sendiri untuk dapat, mampu, dan mau memajukan dirinya. Kesadaran kritis ini kelak akan sangat diperlukan petani tembakau sebagai salah satu jalan melihat dan mengukur kemampuannya untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya.

APTI Temanggung sebagai salah satu kelompok kepentingan yang selalu ingin mempertahankan keberadaan petani tembakau dan komoditas tembakau terutama di Temanggung, berusaha melalui berbagai macam cara untuk mendesak pemerintah supaya RRU pertembakauan segera di sahkan menjadi UU. Berikut ada 3 cara (aksi) terakhir yang dilakukan APTI Temanggung adalah:

1. Ratusan petani tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, pada tanggal 16 November 2016 bertolak menuju Jakarta untuk beraudensi dengan ketua DPR RI.
2. Ratusan petani tembakau dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) berbagai daerah di Jawa Tengah, menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Senin (9/1/2017).
3. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Temanggung mengadakan doa bersama dan pemasangan baliho berisi tuntutan petani tembakau yang dilaksanakan Jumat (17/3/2017) di sekitar jembatan Kranggan, kabupaten Temanggung.

Seperti dalam kegiatan atau cara yang dilakukan APTI Temanggung, kalau di lihat dari kemampuan untuk mengerahkan dukungan tenaga, dan sumber daya, mereka cukup berhasil memobilisasi massa petani untuk bersama sama menyampaikan aspirasi mereka untuk di dengar dan di respon, mereka secara berkala melakukan kunjungan dan pertemuan ke jakarta untuk bertemu dan berdiskusi dengan anggota DPR, tidak sampai di situ mereka juga bersama sama APTI dari kabupaten di Jawa Tengah, melakukan aksi di Kota Semarang, dan akhirnya bisa bertemu dengan Gubernur Ganjar Pranowo.

Lalu jika dilihat dari luasnya sumberdaya yang dimilikinya, seperti kemampuan finansial, jumlah anggota, kecakapan politik, kesatuan organisasi dan prestisenya di mata masyarakat umum atau para pembuat keputusan pemerintahan. Anggota APTI selama ini melakukan aksi menyampaikan aspirasi berdasarkan dari aspirasi dari mereka sendiri tanpa di tumpangi kepentingan dari pihak lain.

Sementara kalau di lihat dari sifat dari issue dan kebijaksanaan pemerintahan pada waktu ini, dengan adanya banyak impor tembakau dari luar negeri, pemerintah seharusnya memberikan perlindungan hukum dan pola budidaya tembakau, selama ini bibit tembakau unggulan seperti bibit kemloko bisa sampai di negara cina, harusnya pemerintah memberi perlindungan terhadap hasil bibit unggulan pribumi, supaya tidak “dicuri” oleh pihak asing. Indonesia sebagai negar agraris seharusnya pemerintah dapat mendengarkan aspirasi dar para petani, terutama dari petani tembakau.

Dalam usaha APTI Temanggung untuk melakukan peningkatan kesejahteraan petani tembakau juga tak lepas dari beberapa kendala. Adapun kendala yang dihadapi antara lain:

1. Banyaknya petani tembakau di Temanggung dan luasnya area sentra pertembakauan di Kabupaten Temanggung yaitu sebanyak 14 Kecamatan menyebabkan belum dapat meratanya implementasi program-program APTI Temanggung yang sebenarnya ditunjukkan dan seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh petani tembakau di Kabupaten Temanggung.
2. Minimnya pendanaan yang dimiliki APTI Temanggung sehingga akan berpengaruh pada kuantitas dan pelayanan untuk implementasi program-program kesejahteraan petani. Selama ini untuk membiayai semua aktivitas kegiatan APTI Temanggung menggunakan dana swadaya masing-masing pengurus ataupun dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain.
3. Sulitnya mengubah pola pikir petani tembakau agar dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sebagus apapun suatu program yang dilaksanakan APTI Temanggung, ketika daya penerimaan dan keterbukaan pola pikir dari petani masih rendah akan menyebabkan kurangnya manfaat yang akan diterima petani tersebut. Di Kabupaten Temanggung, masih banyak petani tembakau yang tetap mempertahankan pola tanam sesuai apa yang diajarkan secara turun-temurun sehingga tidak semua petani tembakau dapat menerapkan program-program yang telah dirumuskan APTI Temanggung.
4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pengurus APTI Temanggung yang benar-benar memiliki kemauan dan kemampuan untuk benar-benar fokus menjalankan program-program APTI Temanggung secara menyeluruh menyebabkan belum meratanya program ke semua wilayah sentra pertembakauan di Kabupaten Temanggung. Di setiap sentra memang ada PAC yang bertugas mengawasi petani tembakau di wilayahnya masing-masing, tapi beberapa di antara mereka kurang aktif dan tanggap untuk melihat lebih dalam mengenai masalah yang dihadapi petani sehingga terkadang program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kondisi daerah.
5. Kurangnya komunikasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung yang menyebabkan kurangnya koordinasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pertembakauan. Minimnya koordinasi ini juga yang kemudian mengakibatkan kurang harmonisan hubungan antara APTI Temanggung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.

Dengan program-program yang dilakukan APTI Temanggung, secara langsung memang berpengaruh pada peningkatan kualitas baik kualitas hidup maupun kualitas pendapatan petani tembakau. Program-program APTI Temanggung yang membantu petani tembakau baik dari segi permodalan, peningkatan kualitas bahan baku, penyediaan bibit, dll berhasil memudahkan petani untuk lebih efektif dalam proses pertembakauan.

Program-program kemitraan itu paling tidak akan lebih memudahkan petani tembakau untuk mendapatkan hal-hal yang dibutuhkannya dalam proses pertembakauan. Jika proses awal dapat dilalui dengan baik, maka hal ini akan berimbas pada kualitas hasil tembakau yang dihasilkan petani. Apabila hasil tembakau bagus, maka hal ini akan berbanding lurus dengan pendapatan yang diterima petani tembakau. Dengan pendapaan yang bagus maka akan lebih memudahkan petani untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

E. Kesimpulan

Bentuk perjuangan APTI Kabupaten Temanggung dalam memerjuangkan RUU pertembakauan adalah mobilisasi masa petani untuk bersama sama menyampaikan aspirasi mereka untuk didengar dan direspon, yang dapat dilihat dari aksi mereka turun ke jalan secara peridoik dan mencoba menemui anggota dewan dan pejabat yang berpengaruh terhadap suatu kebijakan. Partai politik bisa menjadi alternatif lain supaya aspirasi mereka dan keinginan mereka dapat tercapai.

Cara perjuangan APTI Kabupaten Temanggung dalam memerjuangkan RUU pertembakauan adalah mengerahkan dukungan tenaga, dan sumber daya, mereka secara berkala melakukan kunjungan dan pertemuan ke Jakarta untuk bertemu dan berdiskusi dengan anggota DPR, tidak sampai disitu mereka juga bersama APTI dari Kabupaten di Jawa tengah, melakukan aksi di Kota Semarang.

Efektifitas perjuangan APTI Kabupaten Temanggung dalam memerjuangkan RUU pertembakauan adalah belum berjalan secara efektif, hal ini dikarenakan banyak faktor internal maupun eksternal dari kelompok kepentingan tersebut. Kurangnya dukungan tenaga dan sumber daya yang dimiliki terbatas oleh kemampuan finansial, jumlah anggota, kecakapan politik, kesatuan organisasi.

Faktor pendukung perjuangan APTI agar semua aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah adalah adanya pendekatan kepada para anggota dewan yang diharapkan bisa menjadi suara aspirasi para petani. APTI Kabupaten Temanggung mendapatkan dukungan dari para petani dan juga para anggota dari APTI itu sendiri, hanya sebatas aksi masa untuk menyuarakan aspirasi mereka, pedekatan kepada para tokoh berpengaruh seperti para anggota DPR dan pemimpin daerah.

Faktor penghambat perjuangan APTI adalah belum meratanya implementasi program-program APTI Temanggung yang sebenarnya bertujuan untuk mensejahterakan seluruh petani tembakau di Kabupaten Temanggung, banyaknya pihak yang saling tarik menarik kepentingan dengan masalah pertembakauan, sehingga kesejahteraan para petani tembakau terabaikan.

F. Saran

Dari hasil kesimpulan-kesimpulan di atas serta pembahasan dan pemaparan hasil penelitian dengan mempertimbangkan serta menganalisa secara langsung kondisi di lapangan maka penelitian ini menghasilkan beberapa saran atau rekomendasi untuk peran APTI Temanggung maupun penelitian ke depan, sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah.
2. Menjalin kemitraan dengan lebih banyak pihak atau perusahaan
3. Meningkatkan kemampuan APTI Temanggung supaya dapat menjangkau lingkup perjuangan yang lebih luas terutama pada lingkup nasional.

G. Daftar Pustaka

Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo

Mohtar Mas'ood dan Colin MacAndrews, 2001, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Budi Suryadi, 2006, *Kerangka Analisis Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: IRCiSoD

Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Dye, 1978, Ripley, 1985, Winarno, 2002, Lester dan Stewart, 2002.

Ahmad Taufiq. 2006 Modul *Dasar-Dasar Penelitian*. Semarang : FISIP UNDIP.